

## Kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang

Nursalam<sup>1\*</sup>, Ajis S.Adang Djaha<sup>2</sup>, Melkisedek.N.B.C. Neolaka<sup>3</sup>, William Djani<sup>4</sup>, Alfred O.Ena Mau<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> *Administrasi Publik (S2), Fisip, Universitas Nusa Cendana Kupang*

[nursalamjepu@yahoo.com](mailto:nursalamjepu@yahoo.com)

### Abstract

Rural tourism is an alternative tourist destination because of its attractive potential, so that many rural areas are visited. Community service carried out by the community service team for the Master of Public Administration study program, Fisip Undana, aims to provide education to the community related to the development of rural tourism through collaboration. Based on the results of a situation analysis of the existence of collaboration in developing destinations in the Buraen sub-district, the problems encountered are; (a) still weak participatory planning in the development of tourist destinations; (b) Tourism destination infrastructure development policies have not been carried out systematically and continuously; (c) the pattern of collaboration is still limited to cooperation between governments, other sectors namely the private sector and the community have not been involved. The solution offered from partner problems is to carry out a community service activity through the form of education. The activities carried out are socializing and providing knowledge to the audience about; (a) the importance of participatory-based planning in the development of rural tourism destinations; (b) incremental policies in the development of rural tourism destinations; (c) collaborative development of rural tourism destinations. While the PkM program assessment method is through program evaluation and outcome evaluation. Based on the results of PkM activities, it is known that all participants understand the socialization material about; (a) participatory-based planning in the development of tourist destinations; (b) incremental policies in the development of tourist destinations; (c) collaborative development of rural tourism destinations. It is recommended that collaborative development of tourist destinations is not just an idea but should be implemented and also involve the community so that they can benefit from rural tourism activities.

**Keywords:** Rural Tourism; Participatory Planning; Incremental policy; Collaboration

### Abstrak

Pariwisata pedesaan merupakan salah satu alternatif destinasi wisata karena potensi daya tariknya, sehingga wilayah pedesaan banyak dikunjungi. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim PPM Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana bertujuan memberikan Pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan pengembangan pariwisata pedesaan melalui kolaborasi antar berbagai pihak di Kelurahan Buraen kecamatan Amarasi Selatan kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil analisis situasi terhadap kolaborasi dalam pengembangan destinasi di Kelurahan Buraen, masalah yang dihadapi adalah; (a) masih lemahnya perencanaan partisipatif dalam pengembangan destinasi wisata; (b) Kebijakan pengembangan infrastruktur destinasi wisata belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan; (c) pola kolaborasi masih terbatas pada kerjasama antar pemerintah, sektor lain yaitu swasta dan masyarakat belum dilibatkan. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan mitra adalah dilakukan suatu kegiatan

pengabdian masyarakat melalui bentuk Pendidikan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan kepada audien tentang; (a) pentingnya perencanaan berbasis partisipatif dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan; (b) kebijakan inkremental dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan; (c) kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan. Sedangkan metode penilain program PKM adalah melalui evaluasi program dan evaluasi hasil. Hasil sosialisasi adalah seluruh peserta memahami tentang; (a) perencanaan berbasis partisipatif dalam pengembangan destinasi wisata; (b) kebijakan inkremental dalam pengembangan destinasi wisata; (c) kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan. Direkomendasikan agar kolaborasi pengembangan destinasi wisata tidak hanya merupakan suatu ide belaka tetapi seharusnya diimplementasikan dan juga melibatkan masyarakat agar mereka mendapat manfaat dalam kegiatan pariwisata pedesaan.

**Kata Kunci:** Pariwisata pedesaan; Perencanaan Partisipatif; Kebijakan Inkremental; Kolaborasi

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata pedesaan adalah kegiatan waktu luang atau liburan berdasarkan daya tarik wisata pedesaan dan sumber daya lainnya. Secara umum diyakini bahwa pariwisata pedesaan dapat mengarah pada peningkatan kualitas hidup penduduk pedesaan. Kegiatan pariwisata di pedesaan memberikan dampak positif dan bersifat multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Berbagai cara bisa dilakukan agar pertumbuhan ekonomi pedesaan, kemajuan dan perkembangannya dengan melalui kerjasama berbagai pihak dalam pengembangan destinasi wisata. Kerjasama beberapa pemangku kepentingan, dapat dilakukan melalui skema kolaborasi dari masyarakat lokal, investor, dan pihak pemerintah daerah, dan pengunjung (wisatawan).

Kolaborasi merupakan keterlibatan timbal balik dari unsur-unsur yang bekerjasama dan terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama (Healey, 2003). Kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pedesaan dicirikan oleh adanya kerjasama vertikal dan horizontal, terdapat investasi timbal balik dan pertukaran modal manusia, sosial, ekonomi dari pemangku kepentingan pariwisata dalam menciptakan peluang dan mengatasi masalah (Bramwell dan Lane, 2000; Innes, dan Booher, 2003). Konsep kolaborasi sangat penting dilakukan karena meningkatkan sinergi dari para pemangku kepentingan pariwisata.

Kerjasama menciptakan kebersamaan menghadapi berbagai permasalahan, risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pedesaan berimplikasi terhadap terciptanya sikap saling percaya satu sama lain dalam segala situasi, waktu, kesempatan, serta upaya dan dedikasinya.

Potensi destinasi wisata kelurahan Buraen beragam, namun yang paling terkenal adalah destinasi gunung Fatu Braon dan pantai Teres. Infrastruktur pada destinasi di Fatu Braon dan pantai Teles masih minim, sehingga mempengaruhi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Fasilitas-fasilitas yang terlihat adalah Lopo, Gazebo serta area jogging track. Sementara itu di gunung Fatu Braon juga terlihat beberapa fasilitas, yaitu area parkir yang luas, kamar mandi dan Toilet, Gazebo, dan anak tangga batu menuju ke puncak.

Potensi destinasi wisata Fatu Braon dan pantai Teres memerlukan dukungan semua pihak agar potensi tersebut dikelola dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat setempat. Dukungan yang dapat diberikan oleh berbagai pihak dalam

pengembangannya adalah melalui kerjasama pengelolaan. Menurut Gao et al (2009), bentuk kerjasama yang dapat dilakukan berupa; (a) kerjasama antara pengusaha dengan para petani di pedesaan; (b) kerjasama diantara pengusaha, kelompok masyarakat, dan petani; (c) kerjasama diantara, pemerintah daerah, pengusaha, dan petani; dan (d) melalui koperasi petani.

Berbeda halnya dengan pandangan dari Timothy dan Tosun (2003) tentang pengembangan destinasi wisata, mengemukakan model PIC (*Planning, Incremental, and Collaboration*). Konsep model ini merupakan kerangka kerja tiga bagian dalam melakukan perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan pada destinasi pariwisata, dengan penekanan pada pembangunan lokal. Model PIC cocok untuk tujuan wisata pedesaan yang melibatkan partisipasi lokal dan mengakomodir sikap pemangku kepentingan utama dalam membangun aliansi pariwisata di level lokal. Aspek kolaboratif model PIC adalah tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam inisiatif manajemen dan perencanaan kolaboratif terhadap kemungkinan lima arah kemitraan organisasi, yaitu; (a) kerjasama antar lembaga publik; (b) kolaborasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda (tingkat administrasi); (c) kerjasama publik dan swasta (instansi pemerintah dan organisasi swasta); (d) kolaborasi antara organisasi sektor swasta; dan (e) kerjasama lintas batas politik.

Berdasarkan hasil analisis situasi terhadap kemungkinan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata Fatu Braon dan Pantai Teles menurut model PIC, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Partisipatif.

Perencanaan partisipatif yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata Fatu Braon dan pantai Teles dilakukan melalui Musyawarah Kerja Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kelurahan Buraen.

Perencanaan partisipatif merupakan merencanakan yang bersifat bottom-up yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di kelurahan Buraen. Pada kenyataannya keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan pengembangan pariwisata pedesaan, belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat lokal/Buraen karena program dan kegiatan yang dihasilkan merupakan program yang sudah ditetapkan melalui arahan dari Dinas pariwisata kabupaten Kupang.

Berdasarkan data hasil wawancara penduduk setempat dengan penulis, diketahui bahwa masyarakat mengharapkan lebih banyak pelibatan mereka dalam pengembangan destinasi wisata, misalnya mereka diberikan keleluasaan untuk dapat memasarkan hasil-hasil bumi dan diberikan fasilitas pemasaran. Kelurahan Buraen merupakan penghasil hortikultura, buah-buahan, perikanan darat dan laut, dan Bunga atau kembang. Produk-produk dan pertanian dari kelurahan ini umumnya dipasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada disekitarnya. Fasilitas pemasaran di lokasi Fatu Braon dan Pantai Teles tidak diadakan oleh pemerintah kabupaten Kupang. Potensi pemasaran besar, terutama pada hari libur, ketika kunjungan wisatawan. Masyarakat lokal/Buraen sangat mengharapkan dibangun kios dan toko disekitar lokasi destinasi.

#### b. Inkremental

Inkremental merupakan suatu gambaran tentang kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan informasi dari pemerintah

setempat, diketahui program yang dibuat dalam rangka pendukung destinasi wisata Fatu Braon dan Pantai Teles adalah dibangunnya sejumlah fasilitas di tempat destinasi, sarana dan prasarana destinasi masih memerlukan kelanjutan program yang relevan dengan program sebelumnya,

Pada saat ini di pantai Teles telah dibangun sejumlah Lopo sebagai tempat beristirahat bagi pengunjung, namun Lopo tersebut dianggap masih kurang, Lopo yang tersedia sekitar 3 Lopo saja, padahal diperlukan Lopo sepanjang pantai. Pantai Teles sangat Panjang, hanya dilengkapi 5 Lopo saja.

#### c. Pola kolaborasi

Pola kolaborasi yang nampak dalam pengembangan pariwisata pedesaan pada destinasi wisata Fatu Braon dan Pantai Teles hanyalah kerjasama antar pemerintah, yaitu dalam tingkatan pemerintah kabupaten kupang dengan pemerintah pada tingkatan kelurahan (pola Administratif), padahal potensi pengembangan pariwisata memungkinkan kerjasama dengan menggunakan pola kolaborasi antar Lembaga pemerintahan, kolaborasi pemerintah dan swasta, dan pola kolaborasi murni antara organisasi privat dengan privat, bahkan antara organisasi privat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar destinasi.

Berdasarkan uraian analisis masalah dan kondisi empirik tentang pengembangan destinasi wisata pedesaan di kelurahan Buraen kecamatan Amarasi Selatan kabupaten Kupang, maka program PkM ini bertujuan untuk;

- a. Meningkatkan aspek pengetahuan dan wawasan audien tentang perencanaan berbasis masyarakat dalam upaya kolaborasi pengembangan destinasi wisata.
- b. Meningkatkan aspek pengetahuan dan wawasan audien tentang kebijakan yang bersifat inkremental dalam pengembangan destinasi wisata di pedesaan.
- c. Meningkatkan aspek pengetahuan dan wawasan audien tentang berbagai pola kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim PkM Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana Kupang merupakan kelanjutan dari pengabdian sebelum yang juga bertema “pariwisata pedesaan”, kalau sebelumnya pengabdian lebih menekankan pada rintisan pariwisata pedesaan, sedangkan pengabdian yang dilakukan pada tulisan ini terkait dengan “kolaborasi” dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan (Nursalam, 2022).

## 2. METODE PELAKSANAAN

### Metode Pendekatan

Solusi yang ditawarkan dari permasalahan mitra adalah dilakukan suatu kegiatan pengabdian masyarakat melalui bentuk pendidikan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan kepada audien tentang kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan. Tim pengabdian akan memberikan sosialisasi tentang:

- a. Pentingnya perencanaan berbasis partisipatif dalam pengembangan destinasi wisata. Berbagai isu akan disampaikan antara lain; (1) pengertian perencanaan pembangunan desa; (2) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; (3) konsep

perencanaan partisipatif; (partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pedesaan; (4) wilayah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata.

b. Kebijakan Inkremental

Materi yang akan disampaikan yaitu tentang; (1) konsep incremental; (b) kebijakan pembangunan yang bersifat incremental; (3) konsep pengembangan pariwisata berpendekatan incremental; (4) manfaat pendekatan incremental dalam pengembangan destinasi.

c. Kolaborasi pengembangan destinasi wisata.

Aspek-aspek yang akan disajikan tentang kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan yaitu: (1) konsep-konsep kolaborasi; (2) model kolaborasi; (3) kolaborasi pengembangan destinasi wisata; (4) kasus-kasus sukses kolaborasi pengembangan destinasi wisata.

### **Evaluasi Kegiatan PKM**

Penilaian tentang kegiatan PKM dilakukan dengan dua (2) metode penilaian, yaitu evaluasi program dan evaluasi hasil.

#### **Evaluasi Program**

Evaluasi program PKM diadakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PKM tentang kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan di kelurahan Buraen kecamatan Amarasi Selatan kabupaten Kupang. Adapun indikator dalam mengetahui keberhasilan evaluasi program PKM ini adalah:

- a. Target peserta kegiatan sosialisasi PKM tentang kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan di kelurahan Buraen kecamatan Amarasi Selatan kabupaten Kupang adalah minimal 75% kehadiran peserta/ audien yang diundang.
- b. Target kehadiran peserta minimal 75% dari peserta yang mendaftar telah tercapai.
- c. Terdapat kondisi semangat dan antusias peserta yang hadir dan terjalin interaksi yang harmonis dengan tim PPM dari Fisip Undana terjalin dengan baik.

#### **Evaluasi Hasil**

Tujuan evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan sosialisasi tentang PKM kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan yang dilaksanakan di kelurahan Buraen kecamatan Amarasi Selatan kabupaten Kupang.

Indikator penilaian keberhasilan PKM kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan yang dilaksanakan di kelurahan Buraen kecamatan Amarasi Selatan kabupaten Kupang diukur dari:

- a. 75% peserta yang hadir mampu memahami dan mengetahui dengan baik tentang; (1) pengertian perencanaan pembangunan desa; (2) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; (3) konsep perencanaan partisipatif; (partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pedesaan; (4) wilayah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata.
- b. 75% peserta yang hadir memahami bagaimana kebijakan inkremental dalam kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan. Memahami tentang; (1) konsep inkremental; (b) kebijakan pembangunan yang bersifat inkremental; (3) konsep

pengembangan pariwisata berpendekatan inkremental; (4) manfaat pendekatan inkremental dalam pengembangan destinasi.

c. 75% peserta yang hadir memahami tentang; (1) konsep-konsep kolaborasi; (2) model kolaborasi; (3) kolaborasi pengembangan destinasi wisata; (4) kasus-kasus sukses kolaborasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Kegiatan PKM

Kegiatan PKM tentang kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Amarasi Selatan. Kegiatan diikuti oleh; Camat Amarasi Selatan, seluruh aparat kantor kecamatan Amarasi Selatan, Lurah dan Sekretaris Lurah Buraen, Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Amarasi Selatan, Tokoh masyarakat, yang berjumlah 45 orang. Kegiatan ini juga dipadukan dengan PKM Prodi Administrasi Negara Fisip Undana dengan topik tentang pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan.



**Gambar 1.** Suasana kegiatan sosialisasi PKM Prodi Magister Administrasi Publik Undana

Selengkapnya tentang kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

### **Perencanaan Partisipatif**

Nara sumber yang membahas tentang perencanaan partisipatif, mengemukakan pokok pikirannya tentang perlunya perencanaan partisipatif dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan. Menurut nara sumber bahwa yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat sehingga dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan, masyarakat pedesaan sendiri yang menentukan apa yang hendak dilakukan untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah pedesaan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat adalah suatu proses dalam membangun masyarakat itu sendiri untuk mendorong kepekaanya terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian masyarakat diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Pemerintah berkewajiban mempersiapkan masyarakat tidak hanya sebagai objek akan tetapi juga sekaligus sebagai subjek dari berbagai program yang dijalankan pemerintah. Menurut nara sumber bahwa masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan harus ikut serta aktif dalam pembangunan, menikmati hasil pembangunan dan melestarikan proses pembangunan itu sendiri secara berkesinambungan.

### **Pendekatan Kebijakan Inkremental**

Nara sumber yang kedua menyapaikan materi PKM tentang pendekatan kebijakan incremental dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan. Menurut nara sumber bahwa pengembangan destinasi wisata tidak seperti membalikkan tangan, sehingga dengan mudah tercapai tujuan pengembangan. Secara konseptual menurut nara sumber, bahwa yang dimaksud dengan pendekatan kebijakan inkremental adalah kebijakan yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendekatan Inkremental sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu, dengan hanya mengubahnya (memodifikasi) sedikit-sedikit.

Banyak faktor yang ikut berpengaruh dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata, terutama faktor sumber daya (anggaran, fasilitas, infrastruktur pariwisata). Oleh karena itu menurut nara sumber kebijakan pengembangan harus memperhitungkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh wilayah setempat. Perlu waktu dan tahap-tahap untuk melengkapi semua infrastruktur destinasi wisata.

Terkait dengan hal ini, tentu saja pengembangan infrastruktur destinasi wisata di pedesaan adalah merupakan tanggung jawab perintah daerah. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten melalui mekanisme Musrenbang.

Terkait dengan pengembangan destinasi wisata pedesaan, kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya. Pendekatan ini sangat bermanfaat karena melanjutkan berbagai hal dianggap masih bagus dan relevan, sedangkan yang kurang atau mengalami masalah diberikan perbaikan.

### **Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Pedesaan**

Sementara itu nara sumber ketiga menyampaikan materinya terkait dengan kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan. Kolaborasi merupakan

keterlibatan timbal balik dari unsur-unsur yang bekerjasama dan terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama pariwisata pedesaan. Kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pedesaan dicirikan oleh adanya kerjasama vertikal dan horizontal, terdapat investasi timbal balik dan pertukaran modal manusia, sosial, ekonomi dari pemangku kepentingan pariwisata dalam menciptakan peluang dan mengatasi masalah.

Kolaborasi tidak sekedar kerjasama tetapi lebih dari itu, kolaborasi menciptakan sinergi dan manfaat timbal balik diantara aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan. Pola ini sangat menjanjikan dan hasilnya tentu saja pariwisata pedesaan menjadi berkembang.

Selain nara sumber menyampaikan materinya juga Camat Amarasi Selatan kabupaten Kupang menyampaikan materinya tentang potensi pariwisata di wilayah kecamatan Amarasi Selatan yang mempunyai prospek pengembangan. Menurut Camat bahwa wilayah kecamatan Amarasi Selatan menyimpan banyak potensi yang meliputi potensi dibidang; kelautan, alam dan kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, budaya dan kuliner. Semua potensi ini berpeluang dikembangkan menjadi objek wisata, namun menurut Camat Amarasi Selatan bahwa yang paling nyata untuk dikembangkan adalah potensi keindahan alam Gunung Fatu Braon dan Pantai Teres.

Menurut Camat Amarasi Selatan, letak wilayahnya sangat strategis karena jarak Ibu Kota Kecamatan (Kelurahan Buraen) dengan Kota Kupang  $\pm$  35 Km saja yang ditunjang dengan aksesibilitas jalan yang cukup memadai. Setiap hari Sabtu dan Minggu jumlah pengunjung/wisatawan yang berkunjung ke Fatu Braon dan Pantai Teres sekitar 500 orang.

Pada akhir pertemuan antara Tim PKM Prodi Administrasi Publik (S2) dengan aparat Kecamatan, Kelurahan, masyarakat setempat dilakukan diskusi yang membicarakan berbagai hal tentang pengembangan destinasi wisata pedesaan. Pemerintah setempat dan masyarakat sangat bersemangat dalam diskusi tersebut. Salah satu hal menarik disampaikan oleh peserta pertemuan adalah perlu memberikan daya tarik untuk kegiatan pariwisata di kelurahan Buraen. Menurut salah satu peserta bahwa infrastruktur yang ada masih sangat terbatas, selain perlunya disediakan kuliner bagi pengunjung. Kedua hal yang disampaikan oleh peserta tersebut berpeluang memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mendapatkan manfaat.

#### 4. SIMPULAN

Di era saat ini wilayah pedesaan memiliki lebih banyak fungsi dari hanya memproduksi komoditas, wilayah pedesaan juga menjadi tempat rekreasi atau pariwisata. Pengembangan destinasi wisata pedesaan memerlukan keterlibatan berbagai lembaga di lokasi pedesaan untuk berkolaborasi secara strategis.

Berdasarkan uraian kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan dan hasil PKM Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana disimpulkan beberapa hal tentang pengembangan destinasi wisata pedesaan, yaitu;

- a. Pariwisata pedesaan merupakan salah satu konsep dan aktivitas relatif baru bagi pengembangan ekonomi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Model pengembangan destinasi pariwisata pedesaan terdiri dari tiga unsur, yaitu; perencanaan pengembangan berbasis masyarakat; kebijakan pengembangan menggunakan pendekatan inkremental; dukungan berbagai pihak melalui kolaborasi.
- c. Kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan kerjasama vertikal dan horizontal, terdapat investasi timbal balik dan pertukaran modal manusia, sosial, ekonomi dari pemangku kepentingan pariwisata dalam menciptakan peluang dan mengatasi masalah yang terjadi di daerah pedesaan

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada penyedia dana PKM yaitu Fisip Universitas Nusa Cendana Kupang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah kabupaten Kupang, khususnya kepada Camat Amarasi Selatan dan Lurah Buraen atas fasilitas yang diberikan dalam kegiatan PKM Prodi Magister Administrasi Publik Fisip Undana Kupang.

## 6. REKOMENDASI

Kolaborasi pengembangan destinasi wisata pedesaan merupakan salah satu bentuk kerjasama dan keterlibatan pihak lain dalam upaya pembangunan pariwisata pedesaan. Berdasarkan hasil diskusi dalam PkM, direkomendasikan agar kolaborasi pengembangan destinasi wisata di pedesaan bukan sekedar konsep saja tetapi juga segera diwujudkan. Kolaborasi yang akan dilakukan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk kerjasama antar warga sehingga mereka memperoleh manfaat dalam kegiatan pariwisata pedesaan.

## 7. REFERENSI

- Bramwell. B., B.Lane., 2000. *Tourism Collaboration and Partnerships: Politics, Practice and Sustainability*. Channel View Publications: Clevedon
- Gao, Shunli , Songshan Huang., and Yucheng Huang., 2009, Rural tourism development in China, , *International Journal of Tourism Research*, 11. DOI: 10.1002/jtr.712
- Healey. P., 2003, Collaborative Planning in perspective, *Planning Theory*, <https://doi.org/10.1177/14730952030022002>.
- Innes, J. E., D.E. Booher (2003). Collaborative policymaking: Governance through dialogue. In *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934.003>
- Nursalam, Hendrik Toda., William Djani., Melkisedek.M.B.C.Neolaka, 2022, Rintisan Pariwisata Pedesaan di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, *Jurnal JDistira*, Vol 2 Nomor 1.
- Timothy DJ., C. Tosun., 2003. Appropriate Planning for Tourism in Destination Communities: Participation, Incremental Growth and Collaboration. In *Tourism in Destination Communities*, Singh S et al. (eds). Cabi Publishing: Wallingford.